PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH

Course Title Lecturer

Assistant

: Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

: Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily M.Si

ace.hasan@gmail.com

: Facebook: acehasansyadzily

Twitter: acehasan76



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN – JAKARTA 2020

PENGERTIAN

- Pengembangan Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah (PPED) adalah proses kepentingan yang dilakukan antara Pemerintah daerah, swasta produsen, dan masyarakat untuk mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sumber daya alam dalam rangka menciptkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. (Blakely, 1991)
- □ PPED, menurut AHJ Hekming, merupakan suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat dan dunia usaha dalam mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tertetu.

LANJUTAN...

- Konsep PPED memberikan penekanan pada kekuatan dan mobilisasi sumber daya, kapasitas dan keterampilan yang dimiliki daerah untuk dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk tercapainya pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkalanjutan.
- Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kata kunci yaitu, 1) kerjasama antara semua komponen dengan pendekatan yang partisipatif. 2) pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal yang dimiliki daerah.

TUJUAN PPED

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah;
- 2. Menciptakan dan memeratakan kesempatan kerja di suatu wilayah
- 3. Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat
- Meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah lain;
- Membangun dan mengembangkan kerjasama yang positif antar daerah

Do local fundamental indicators matter?

- → Fundamental ekonomi negara sering dibahas tapi fundamental ekonomi daerah relatif langka
- → Masih rendahnya peringkat resiko negara (sovereign/political/macro risk):
 - BB (somewhat weak)
 - Tapi macro (country) risk tidak sama dengan micro (local) risk.
 Contoh: pada tahun 1998 ek Indonesia kontraksi –13% tapi Batam tumbuh 3,5%, bahkan Papua tumbuh 9,9%

Pentingnya pengembangan ekonomi lokal dan daerah (PELD) bagi perekonomian nasional dan daerah

Nasional

- •• Perekonomian daerah adalah bagian integral dari perekonomian nasional, apabila kinerja perekonomian daerah baik, maka secara agregat, perekonomian nasional akan baik juga.
- •• Sesuai dengan kerangka Kebijakan Desentralisasi & Otonomi daerah, bahwa PELD adalah urusan pilihan daerah.
- •• PPED erupakan kebutuhan/strategi nasional dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing daerah maupun nasional.

Pentingnya pengembangan ekonomi lokal dan daerah (PELD) bagi perekonomian nasional dan daerah

- ••Peningkatan kesempatan berusaha.
- ••Penyerapan tenaga kerja.
- ••Retensi Bisnis. Bisnis merasa dihargai oleh masyarakat dan, pada gilirannya, masyarakat akan cenderung untuk tinggal di daerah.
- ••Diversifikasi Ekonomi. Basis ekonomi yang beragam akan membantu memperluas pengembangan ekonomi lokal dan mengurangi kerentanan masyarakat untuk satu bidang usaha.
- ••Swasembada. Basis ekonomi yang lebih kuat berarti pelayanan publik tidak terlalu bergantung kepada pengaruh antar pemerintah dan aliansi, yang dapat berubah kebijakannya pada setiap pemilihan kepala daerah.
- ••Peningkatan Basis Pajak dari Dunia Usaha dan Masyarakat.
- ••Pengakuan Produk Lokal. Pembangunan ekonomi lokal yang sukses sering terjadi ketika barang yang diproduksi secara lokal dikonsumsi di pasar lokal, nasional maupun internasional.
- ••Peningkatan Daya Saing. Pengembangan ekonomi lokal dengan fokus pengembangan komoditi unggulan daerah dalam bentuk klaster dapat meningkatkan daya saing daerah dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015.

DAERAH

II. FUNDAMENTAL EKONOMI DAERAH

Sasaran fundamental ekonomi Daerah adalah:

a. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi daerah (rog) dihitung dengan:

$$rog = ((PDRBt - PDRBt-1) / PDRBt-1) \times 100 \%$$
.

b. Meningkatkan pendapatan per kapita.

Pendapatan per kapita (Ycapita) dihitung dengan:

Ycapita = PDRB / jumlah penduduk.

c. Mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan.

Sasaran ini menunjukkan bahwa manusia merupakan. hakekat dari tujuan pembangunan.

INDIKATOR

a. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per

kapita		
I	Tipologi Daerah	
PDRB per Kapita (Laju Pertumbuhan ®	$(y_i > y)$	(y _i < y)
(r _i > r)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi	Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi
(r _i < r)	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah

Berdasarkan kriteria pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, daerah propinsi/kabupaten/kota dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata daerah di Indonesia, misalnya DKI, Kaltim, Bali dan Irja.
- 2. Daerah maju tapi tertekan, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah disbanding rata-rata daerah di Indonesia, misalnya Riau, Aceh dan Kalteng.
- 3. Daerah berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata daerah di Indonesia, misalnya Sulut, Sulteng, Sulsel, Kalsel dan Kalbar.
- 4. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah disbanding rata-rata daerah di Indonesia, misalnya Maluku, Jabar, Bengkulu dan Jateng.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran vang menyeluruh (holistik) dari pembangunan manusia. IPM mengukur rata-rata pencapaian di suatu negara atau daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu (1) longevity sebagai ukuran harapan hidup; (2) pengetahuan yang diukur dengan kombinasi melek huruf penduduk dewasa (berbobot dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah (berbobot sepertiga); dan (3) standar hidup, yang diukur oleh pendapatan (PDB) per kapita riil yang disesuaikan dalam Purchasing Power Parity (PPP\$) yang berbeda-beda di tiap negara. IPM berskala 0 sampai dengan 1, dan membagi negara-negara (daerah-daerah) dalam tiga kategori : pembangunan manusia rendah (0,0 - 0,499), pembangunan manusia menengah (0,50 -0,799) dan pembangunan manusia tinggi (0,8 - 1,0) (Todaro, 2002).

Rumus untuk menghitung IPM adalah:

IPM = 1/3 (indeks pendapatan) + 1/3 (indeks harapan hidup) + 1/3 (indeks pendidikan)

Komponen *longevity* diukur dengan menggunakan indikator harapan hidup.

Komponen pengetahuan diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu: tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Indikator melek huruf dimaksudkan sebagai jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas atau lebih yang mampu membaca dan menulis huruf latin sebagai persentase total jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Indikator rata-rata lama sekolah adalah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan penduduk berusia 15 tahun keatas yang dihitung dengan memasukkan dua variabel yaitu: gelar yang diperoleh dan pencapaian tingkat pendidikan.

Komponen standar hidup yang layak diperoleh dengan menggunakan indikator tingkat konsumsi riil per kapita yang disesuaikan.

Klasifikasi daerah-daerah di Indonesia berdasarkan IPM dan pendapatan per kapita, dapat di kelompokkan sebagai berikut:

- § Daerah dengan pendapatan dan pembangunan manusia tinggi, yaitu : Kaltim, DKI, Bali, Kalteng, Riau, dan Sumut.
- § Daerah dengan pendapatan tinggi, namun pembangunan manusianya rendah, yaitu : Irja dan Kalsel.
- § Daerah dengan pembangunan manusia tinggi, namun pendapatannya rendah, yaitu : Maluku, Aceh, DIY, Bengkulu, Lampung, Maluku, Jabar, Jambi, Jateng, Sulut .
- § Daerah relatif tertinggal, baik dalam pendapatan maupun pembangunan manusianya, yaitu : NTB, Kalbar, NTT, Sulteng, Sultra, Sumsel, Jatim dan Sulsel.

Klasifikasi daerah-daerah di Indonesia berdasarkan IPM dan pertumbuhan ekonomi daerah adalah:

- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pembangunan manusia tinggi, yaitu : Sulut, Kaltim, Sumut, Sumbar, Jambi, Jabar, Jateng, Bengkulu, dan Lampung.
- Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, namun pembangunan manusianya rendah, yaitu : NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, Sulsel dan Kalsel.
- Daerah dengan pembangunan manusia tinggi, namun pertumbuhan ekonominya rendah, yaitu : Maluku, Aceh, Kalteng, Bali, Riau, DIY dan DKI.
- Daerah relatif tertinggal, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusianya, yaitu : Sumsel, Sultra dan Irja.

Penyusunan indikator fundamental ekonomi merupakan suatu kebutuhan bagi daerah. Hal itu dapat bermanfaat untuk:

- (1) Identifikasi mengenai profil maupun klasifikasi daerah.
- (2) Dijadikan pedoman bagi investor untuk memilih lokasi investasi di daerah.
- (3) Dijadikan pedoman bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Human Development Index (HDI)

- Dasar: Pertumbuhan ekonomi & PDRB hanya mencatat peningkatan produksi barang & jasa, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan "kue" & pertumbuhan kue.
- → HDI mencoba mengukur kinerja pembangunan manusia dengan skala 0 (sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah) hingga 1 (pembangunan manusia yang tertinggi) berdasarkan atas 3 sasaran pembangunan, yaitu:
 - usia panjang (longevity) yang diukur dengan tingkat harapan hidup
 - pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah
 - Standar hidup layak yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan menurut daya beli mata uang di masing-masing daerah.
- → Formula HDI=1/3 [X1+ X2 + X3]
 - di mana X1=Indeks harapan hidup kelahiran; X2= Indeks pendidikan =2/3
 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata-rata lama sekolah); X3= Indeks standar hidup layak.

Otonomi Daerah dan Pembangunan Fundamental Ekonomi Daerah

Tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu (Mardiasmo, 2002):

- 1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah memiliki sejumlah kewenangan terutama 11 (sebelas) kewenangan wajib sebagaiman ditentukan dalam UU No. 22 tahun 1999. Kesebelas kewenangan wajib tersebut merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah. Harapan yang ingin diperoleh dari Pemerintah Daerah antara lain adalah:

- 1. Fasilitas
- 2. Pemerintah Daerah harus kreatif
- 3. Politik lokal yang stabil
- 4. Pemda harus menjamin kesinambungan berusaha
- 5. Pemda harus komunikatif dg LSM, terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup
- 6. Penciptaan lapangan kerja

Mengapa tertinggal:

- →Rendahnya tingkat pendidikan dan Human Development Index (IPM)
- →Mengandalkan sektor pertanian yang tradisional, bahkan subsisten, dan rendah dari penggunaan mekanisasi pertanian
- →Tingginya biaya membeli input antara karena sistem transportasi kurang memadai dan belum berkembang sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- →Pelayanan jasa dan perbankan belum merata di banyak wilayah
- →Kondisi kesehatan rendah (busung lapar, malaria dll)

ASPEK UTAMA PPED

Kelompok Sasaran

Manajemen

Faktor lokasi

PPED

Tata Kepemerintahan Sinergi dan fokus kebijakan

Pembangunan Berkelanjutan

- Kelompok Sasaran
- Pelaku usaha lokal: modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen dan kelembagaan
- Investor luar: peraturan tentang kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, advertasi, pusat pelayanan investasi.
- Pelatihan kewirausahaan, pendampingan dan monitoring, insentif dan kecepatan izin

- Faktor Lokasi
- Faktor lokasi terukur: aspek ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan udara dan laut, sarana transportasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga terampil dan jumlah lembaga keuangan lokal
- Faktor lokasi tidak terukur individual: kualitas pemukiman, lingkungan, faskes, fasos, fasum, etos kerja SDM;
- Faktor lokasi tdk terukur pelaku usaha: peluang kerjasama, lembaga penelitian

- Sinergi dan Fokus Kebijakan
- Perluasan ekonomi: memberikan kebijakan investasi, promosi persaingan usaha, peran perusahaan daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja dan pengembangan keahlian
- Pembangunan wilayah: perumusan kebijakan tentang kawasan industri, pusat pertumbuhan, pengembangan komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PPED, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan
- Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan komunitas: kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan swasta dan pengurangan kemiskinan

- Pembangunan Berkelanjutan
- Ekonomi: pengembangan industri pendukung, perusahaan dengan bisnis plan, perusahaan dengan inovasi
- Sosial: kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan kelembagaan lokal
- Lingkungan: penerapan amdal, daur ulang, kebijakan konservasi sumber daya alam

- Tata Pemerintahan
- Kemitraan pemerintah dan dunia usaha: kemitraan dlm penyediaan infrastruktur, promosi, perdagangan dan pembiayaan
- Reformasi sektor publik: reformasi dalam sistem insentif, restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik
- Pengembangan organisasi: asosiasi industri dalam status, peran dan manfaat

- Proses manajemen
- Diagnosis partisipatif: yaitu analisis dan pemetaan potensi ekonomi, daya saing, kondisi politik lokal serta identifikasi stakeholder
- Monitoring dan evaluasi
- Perencanaan dan implementasi partisipatif